

Daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung jawab	Target Penyelesaian	Klasifikasi
Undang-undang				
1	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	2025: Penyusunan RUU dan pembahasan PAK. 2026: Penyelarasan NA dan RUU & Harmonisasi RUU. 2027: Harmonisasi RUU dan kesiapan teknis untuk Prolegnas Prioritas. 2028: Masuk Prolegnas Prioritas, Pembahasan di DPR, dan Penetapan RUU.	Komunikasi Publik
2	Rancangan Revisi UU Pos	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	2026: penyusunan Naskah Akademik dan DIM 2027: Penyusunan Rancangan Revisi Undang-Undang 2028: Pembentukan dan Pembahasan dalam PAK 2029: Pembahasan di DPR dan penyelesaian revisi UU Pos *penyelesaian	Transformasi Digital
Peraturan Pemerintah				
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	2027	Transformasi Digital

2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital)	2024: Ditargetkan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi. 2025: Fasilitasi pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum sampai ditetapkan Presiden. 2026: Bimtek peraturan RPP PDP	Transformasi Digital
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital)	2024: Ditargetkan diserahkan ke Kumham untuk harmonisasi. 2025: Ditetapkan oleh Presiden	Transformasi Digital
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital)	2025: Kajian dan rekomendasi kebijakan 2026: Rekomendasi dan penyusunan draft 2027: PAK dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi	Transformasi Digital

5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital)	2024: ♦ Ditargetkan penyusunan kajian dan draft awal pada tahun 2024 ♦ Pengajuan Progsun tahun 2024; 2025: Ditargetkan pembahasan PAK dan harmonisasi Kumham pada tahun 2025.	Transformasi Digital
6	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Revisi UU KIP	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	2028-2029: Penyusunan Kajian dan draf RPP.	Komunikasi Publik
7	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	2028	Transformasi Digital
8	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital)	2029	Transformasi Digital

Peraturan Presiden

1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos Universal	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	2024: penyusunan NA Redesain LPU dan Legal Drafting Rancangan Perpres, Pengusulan Proleg. 2025: Pembentukan panitia antar Kementerian, Pembahasan Draf, Finalisasi Draft, Harmonisasi, Pengesahan Presiden, Pencantuman ke Lembaran Negara, Sosialisasi.	Layanan
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Sektor Telekomunikasi	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital)	2025 : melakukan kajian dan menyiapkan draft RPerpres 2026: pengusulan ke dalam Progsun dan pembahasan RPerpres 2027: pembahasan RPerpres dan penetapan RPerpres	Layanan
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital)	2024: RPerpres telah disampaikan ke KemenPAN-RB pada bulan Mei 2024. 2025: Fasilitasi pembahasan di KemenPAN-RB dan harmonisasi di Kemenkum sampai di tetapkan Presiden Tahun 2025.	Transformasi Digital

4	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Publik)	2025: Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada 2025.	Komunikasi Publik
5	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital)	2025: melakukan pembahasan kembali dengan K/L terkait 2026: penetapan RPerpres	Layanan
6	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Pengembangan Infrastruktur <i>Data Center</i> dan Sistem Komunikasi Kabel Laut	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital)	2026: melakukan kajian dan menyiapkan draft RPerpres 2027: pengusulan ke dalam Progsun dan pembahasan RPerpres 2028: pembahasan RPerpres dan penetapan RPerpres	Transformasi Digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital

1	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital)	2025	Transformasi Digital
2	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyiaran berbasis Media Satelit	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2026	Transformasi Digital
3	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital)	2025	Transformasi Digital

4	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2026	Layanan
5	Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Spektrum Frekuensi Radio untuk <i>Studio-to- Transmitter Link</i>	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2027	Layanan
6	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Izin Kelas	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2025	Transformasi Digital
7	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 3,5 GHz	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2027	Transformasi Digital
8	Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital)	2026	Transformasi Digital
9	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital)	2026	Layanan
10	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital)	2026	Transformasi Digital

11	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital)	2027	Transformasi Digital
12	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	2025	Transformasi Digital
13	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	2025	Layanan
14	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Integrated Broadcast Broadband (IBB)	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	2026	Layanan
15	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Media 5G	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	2027	Layanan
16	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Free-To-Air (FTA) Satelit	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	2029	Layanan

17	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)	2024: ♦ Telah selesai harmonisasi pada tahun 2024 (akhir Mei); ♦ Menunggu surat selesai harmonisasi; ♦ Ditargetkan pengundangan selesai pada tahun 2024.	Transformasi Digital
18	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Publik	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)	2024: ♦ Sudah diserahkan ke Kumham untuk Harmonisasi (akhir Mei 2024); ♦ Ditargetkan untuk selesai Harmonisasi dan penetapan pada tahun 2024.	Transformasi Digital
19	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penerbit Gim	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital)	2024: ♦ Draft awal sudah disusun, finalisasi draft ditargetkan pada bulan Juli 2024; ♦ Ditargetkan sinkronisasi internal Aptika pada bulan Agustus 2024; ♦ Ditargetkan harmonisasi internal di Biro Hukum Kominfo pada bulan September 2024; ♦ Ditargetkan harmonisasi eksternal Kumham pada bulan Oktober 2024.	Transformasi Digital

20	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik)	2025: Draf awal sudah selesai, namun masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh terhadap Registri. 2025 Ditargetkan selesai dan penetapan pada tahun 2025.	Layanan
21	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pusat Data Nasional	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)	2024: ♦ Ditargetkan draft awa disusun pada tahun 2024 ♦ RPM Progsun pembahasan dengan K/L direncanakan pada tahun 2025. 2025: Ditargetkan selesai dan penetapan pada tahun 2025.	Transformasi Digital
22	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)	2024: ♦ Penyampaian RPM ke Tim Hukum Ditjen Aptika pada bulan Juli 2024; ♦ Ditargetkan sinkronisasi internal Ditjen Aptika pada bulan Agustus 2024; ♦ Harmonisasi Biro Hukum ditargetkan pada bulan Oktober 2024; ♦ Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM ditargetkan pada bulan Desember 2024; 2025: Ditargetkan selesai dan penetapan pada tahun 2025.	Transformasi Digital

23	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital)	2025: Penyusunan kajian moderasi konten (sekaligus untuk Pasal 40 UU 1/2024) 2026: Penyusunan draf 2027: Pembahasan dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi	Transformasi Digital
24	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik)	2027: Penyusunan kajian digital id 2028: Penyusunan draf 2029: Pembahasan dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71)	Layanan

25	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Kebijakan Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)	2025: ◆ Ditargetkan Program regulasi dan pembahasan dengan K/L pada tahun 2025. ◆ Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2025.	Layanan
26	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Pengajuan Keberatan atas Pengenaan Sanksi Administratif	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital / Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital)	2026: Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2026.	Layanan

27	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital / Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital)	2025: Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2025.	Transformasi Digital
28	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (sub Urusan IKP)	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Publik)	2026: Penyusunan kajian/naskah urgensi. 2027: Penyusunan dan penetapan RPM.	Komunikasi Publik

29	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)	2024: ☐ Ditargetkan kajian selesai pada tahun 2024. 2025: ☐ Harmonisasi internal dengan Biro Hukum ☐ Harmonisasi eksternal dengan Kementerian Hukum ☐ Pengundangan dan Penetapan	Transformasi Digital
30	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Peta Jalan (Roadmap) Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Fixed Broadband dan Mobile Broadband	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2026	Transformasi Digital

31	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan)	2025: Penyusunan Naskah Urgensi 2026: Penyusunan rancangan dan penetapan RPM.	Komunikasi Publik
33	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	2029: Penyusunan Kajian dan RPM.	Komunikasi Publik

34	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan)	2025: Penyusunan kajian kurikulum dan NU 2026: Penyusunan dan penetapan RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	Komunikasi Publik
35	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan)	2027: Penyusunan NA/NU Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas 2028: penyusunan dan penetapan RPM Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas *setelah RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ditetapkan	Komunikasi Publik

36	Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru)		
37	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Pos Universal	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)		
38	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Layanan komunikasi dan informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	2025: ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025.	Komunikasi Publik
39	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pengembangan Kemitraan Komunikasi Strategis	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan)	2025: Penyusunan Kajian/Naskah Urgensi. 2026: Penyusunan dan penetapan RPM.	Komunikasi Publik
40	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Corporate University Kementerian Komunikasi dan Digital	BPSDM Komunikasi dan Digital	2026	Dukungan Manajemen

41	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
42	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
43	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
44	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
45	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen

46	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
47	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
48	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Digital	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
49	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
50	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen

51	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
52	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
53	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
54	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2025	Dukungan Manajemen
55	Rancangan Peraturan Menteri Komdigi tentang Kamus Kompetensi Teknis	Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)	2026	Dukungan Manajemen

56	Rancangan Peraturan menteri Komdigi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)	2025	Dukungan Manajemen
57	Rancangan Peraturan Menteri Komdigi tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)	2026	Dukungan Manajemen
58	Rancangan Peraturan Menteri Komdigi tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)	2026	Dukungan Manajemen
59	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)	2028	Transformasi Digital
60	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Gim	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital)	2029	Transformasi Digital
61	Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru)	2026	Transformasi Digital

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika

1	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital	Sekretariat Jenderal (Biro Umum)	2024-2025	
2	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)	2025	Dukungan Manajemen
3	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)	2025	Dukungan Manajemen
4	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Komdigi	BPSDM Komdigi	2025	Transformasi Digital
5	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	BPSDM Komdigi	2025	Transformasi Digital
6	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	BPSDM Komdigi	2026	Transformasi Digital

7	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	BPSDM Komdigi	2027	Transformasi Digital
8	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	BPSDM Komdigi	2028	Transformasi Digital
9	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi	BPSDM Komdigi	2029	Transformasi Digital
10	Keputusan Menteri Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggara Pos dan Status Mutu Penyelenggaraan Pos	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)		
11	Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 246 tahun 2024 tentang Penjatahan Kanal Frekuensi Radio (Channel Allotment) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	2025	Layanan
12	Rancangan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Relasi Media	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Ekosistem Media)	2025: Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025.	Komunikasi Publik

13	Rancangan Keputusan Menteri tentang Kemitraan Kehumasan Pemerintah Daerah	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan)	2025: Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025.	Komunikasi Publik
14	Rancangan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	2025: Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025.	Komunikasi Publik
15	Rancangan Keputusan Menteri tentang Standardisasi Konten Program Prioritas Pemerintah	Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)	2025: Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025.	Komunikasi Publik